

INTISARI

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL

Oleh : Fida Faidah¹ dan Mailinda Eka Yuniza²

Meningkatnya pendapatan rumah tangga dan beragamnya pola serta jenis konsumsi masyarakat berkaitan langsung dengan bertambahnya volume, ragam jenis dan karakteristik sampah dan limbah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kementerian Perindustrian mencatat terdapat 65,2 juta ton timbunan sampah di Indonesia per tahun pada tahun 2016. Di Kabupaten Tegal sendiri, terdapat 120 ribu ton sampah pada tahun 2020 dan bertambah 35 ribu ton pada tahun berikutnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Menggunakan data primer dan sekunder, data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu: Pertama, Kabupaten Tegal sudah memiliki instrument hukum dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yaitu Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kedua, terdapat tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ketiga, kebijakan pengelolaan sampah yang dipilih masih bersifat pragmatis seperti perluasan wilayah tempat pembuangan akhir. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi masalah baru bagi lingkungan dan tidak tercapainya target pengelolaan sampah pada tahun 2025 mendatang.

¹ Mahasiswa Strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

² Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta